

**PENDIDIKAN INKLUSIF : MASALAH KETENAGAAN DAN
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI**



Oleh:

DRA. PURWANDARI, M.Si

TEMU NASIONAL JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2009

**PENDIDIKAN INKLUSIF: MASALAH KETENAGAAN DAN PERAN SERTA
PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN
SEKOLAH INKLUSIF***



Oleh:

Purwandari

(Universitas Negeri Yogyakarta)

Pendahuluan

Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan, karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak-anak yang "normal" supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Sekolah bagi anak berkebutuhan khusus mengikuti model pendidikan khusus tertua yakni model segregasi yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB), mereka terpisah dari teman sebayanya. Sekolah khusus ini memiliki kurikulum, sarana pembelajaran dan guru khusus, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan mengembangkan potensinya secara optimal, karena kurikulumnya dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa (<http://bintangbangsaku.com>). Mereka menjadi kelompok yang termarjinalkan. Kondisi semacam ini masih jauh dari harapan komitmen dalam Konvensi Jeneva yakni pelaksanaan *Education for All* (EFA) atau pendidikan untuk semua. Sama seperti anak-anak lainnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus juga berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama.

* Disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional Jurusan PLB se Indonesia dengan tema "Manajemen Pendidikan Inklusi di Indonesia" pada tanggal 1-3 Agustus 2009 di Hotel Grage, Jl. Sosrowijayan 242 Yogyakarta.

Menjawab segala permasalahan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan juga hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan yang sama dengan teman-teman sebayanya, maka munculah perkembangan terakhir dari model pendidikan yang sekarang mulai dirintis di sekolah-sekolah, yakni model inklusif. Melalui pendidikan inklusif, individu yang berkebutuhan khusus dididik bersama-sama individu lainnya yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Freiberg, 1995, dalam <http://bintangbangsaku.com>). Pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Menurut Efrini (2009) di dalam pendidikan inklusif, anak diterima seperti diri mereka sendiri (*accept as the way they are*), sehingga anak bisa berkembang dan belajar dengan kemampuan masing-masing. Dalam pendidikan inklusif, sistemlah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan anak. Menurut Dirjen PLB (2006) pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dari berbagai kondisi dan latar belakang untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama, dengan layanan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Jadi semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama, seperti dikatakan Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya (<http://smk6-padang.sch.id>). Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif ditekankan adanya



restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap individu, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, orang tua, dan masyarakat sekitarnya (<http://bintangbangsaku.com>).

Berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan sekolah inklusif membutuhkan persiapan yang menyangkut permasalahan yang kompleks, tidak hanya masalah restrukturisasi sekolah namun masalah sumber daya manusia yang benar-benar siap menjalankan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyediaan guru-guru khusus yang dihasilkan perguruan tinggi LPTK memperoleh tantangan cukup serius. Mampukah PT sebagai LPTK menghasilkan guru khusus yang berkualitas?. Bagaimanakah peran serta LPTK sebagai lembaga akademisi yang ikut berperan dalam pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia? Berikut ini akan diuraikan tentang ketenagaan dan peran serta LPTK dalam penyelenggaraan sekolah inklusif.

Masalah Ketenagaan

Di dalam penyelenggaraan sekolah inklusif seperti halnya sekolah umum, masalah yang sangat penting dan membutuhkan pemikiran serius adalah masalah manajemen pendidikannya. Menurut Ali Imron, dkk (dalam Sunardi, 2009) substansi inti dalam manajemen pendidikan meliputi kurikulum dan pembelajaran, kelas, peserta didik, manusia, sarana dan prasarana pendidikan, keuangan dan lembaga, keterlibatan masyarakat dan orangtua. Di dalam makalah ini masalah yang akan



dibahas mengenai sumberdaya manusia yang lebih diperinci lagi mengenai masalah ketenagaan. Masalah ketenagaan di dalam penyelenggaraan sekolah inklusif menyangkut sumberdaya manusia yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran (akademik) dan yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran (non akademik). Mereka membentuk satu tim yang saling bekerjasama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Berikut tenaga-tenaga yang dibutuhkan meliputi:

1. SDM yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, yaitu: guru kelas, guru bidang studi (misalnya olah raga, agama, dll), guru pendamping khusus, guru BK (bimbingan dan konseling), konsultan pendidikan khusus.
2. SDM yang tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran, namun sebagai pendukung yang merupakan tim ahli, terdiri dari terapis (*ocupational therapist, fisiotherapist, speech therapist, dll*), ahli gizi, dokter (umum dan spesialis anak, psikiatri anak, THT), dokter gigi, pekerja sosial, tenaga administrasi.

Masing-masing tenaga sebagai sumberdaya manusia memiliki tugas masing-masing dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Mereka membentuk satu tim dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi peserta didiknya baik yang menyangkut masalah akademik maupun masalah yang berhubungan dengan kesehatan, sosial, psikologis dan penyelenggaraan administrasi sekolah.

Kualifikasi tenaga yang dibutuhkan berlatar belakang pendidikan sesuai kompetensinya dan tugasnya masing-masing. Guru kelas merupakan lulusan S1 sesuai kualifikasi pendidikannya, misalnya matematika, bahasa indonesia, IPA, dll. Selain itu guru khusus berkualifikasi S1 PLB yang memiliki tugas langsung dalam proses



pembelajaran di kelas. Guru pendamping khusus merupakan lulusan S1 PLB yang bertugas sebagai *shadow* yakni mendampingi siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Guru bimbingan konseling memiliki tugas membantu guru kelas/bidang studi dalam menangani siswanya yang mengalami masalah-masalah non akademis yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Konsultan pendidikan khusus bertugas menangani masalah-masalah akademik siswa yang tidak dapat ditangani oleh guru.

Kualifikasi sumberdaya manusia yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran berlatar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan kompetensinya. Terapis okupasi dipersyaratkan minimal lulusan D3 *Occupational Therapy*, *fisiotherapist* minimal lulusan D3 Fisioterapi, *speechtherapist* minimal berpendidikan D3 khusus tunawicara. Tenaga psikolog minimal lulusan S1 psikologi, ahli gizi minimal lulusan S1 ilmu gizi, dokter umum lulusan S1 kedokteran, dokter spesialis merupakan dokter yang mengambil spesialisasi, dan dokter gigi lulusan kedokteran gigi. Sedangkan pekerja sosial berkualifikasi D3 pekerja sosial, dan tenaga administrasi mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi penyelenggaraan sekolah, minimal berpendidikan SMK administrasi.

Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Perguruan Tinggi khususnya LPTK memiliki peran serta penyelenggaraan sekolah inklusif khususnya dalam menyediakan SDM tenaga kependidikan. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci tentang peran serta LPTK dalam menjawab tantangan

tersebut, yakni sebagai lembaga yang seharusnya mengikuti kebutuhan masyarakat dan selalu mengembangkan diri sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pendidikan.

1. Perguruan Tinggi (LPTK) sebagai tempat penyedia SDM yang berkualitas. Dalam penyelenggaraan sekolah inklusif, Jurusan Pendidikan Luar Biasa terlibat langsung dalam penyediaan SDM. Mampukah PLB menjawab tantangan tersebut. Berkaitan dengan kualitas lulusannya, hal yang perlu mendapat perhatian meliputi masalah kurikulum. Kurikulum yang ditawarkan kepada mahasiswa seharusnya bersifat dinamis, artinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan sesuai perkembangan paradigma pendidikan dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat.
2. Perguruan Tinggi sebaiknya memiliki sekolah binaan sebagai tempat mahasiswanya mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah. Sekolah binaan merupakan laboratorium mahasiswa dalam mengasah pengetahuannya dan mengembangkan keterampilannya, sehingga selepas dari PT mereka merupakan tenaga siap pakai (*ready for use*).
3. Mengembangkan *Research Centre* melalui laboratorium. Laboratorium tidak hanya digunakan sebagai tempat praktikum bagi para mahasiswa, juga sebagai pusat penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para dosen. Dosen senantiasa melaksanakan penelitian, sehingga dapat ditemukan pengetahuan-pengetahuan sebagai hasil *research*. Dosen dalam mengajar tidak hanya *text books* dan stagnan namun senantiasa mengembangkan diri dengan *reseach*.

4. Melaksanakan sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus kepada masyarakat melalui pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus yang valid. Dengan berubahnya pola pikir masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus, maka perlakuan mereka terhadap ABK dapat berubah dan ABK bukan lagi kelompok marjinal yang tidak perlu penanganan serius.

Saran Profesional

Saran-saran profesional dalam penyelenggaraan sekolah inklusif dapat ditawarkan sebagai berikut:

1. Perlu penyamaan persepsi tentang pendidikan inklusif dari semua elemen, sehingga memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda, dan dapat menyelenggarakan sekolah inklusif dengan prosedur dan langkah yang jelas.
2. Pengadaan SDM atau Rekrutmen dilakukan secara profesional, yakni menempatkan orang pada tempatnya (*the right man on the right place*).
3. Perlu dikembangkan kolaborasi antar tim kerja profesional, sehingga dalam menangani ABK dapat diperoleh solusi yang menguntungkan bagi ABK.
4. Mengadakan sosialisasi tentang RUU pendidikan inklusif secara meluas tidak hanya kepada lingkungan akademik namun juga kepada masyarakat luas, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas tentang pendidikan inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar dan *workshop* baik dilaksanakan secara regional maupun nasional.

Referensi

- Dirjen PLB, 2006. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SLB Dirjen Dikdasmen.
- Efrini, 2009. <http://www.yettisupriyati.com>.
- Freiberg, 1995. *Model pendidikan inklusi*. <http://bintangbangsaku.com/artikel/2009/02>
- Staub dan Peck (1995). *Pendidikan inklusif*. <http://smk6-padang.sch.id>
- Sunardi, 2009. Manajemen dan Ketenagaan dalam Pendidikan Inklusi. *Makalah tidak diterbitkan*. Solo: PLB FKIP UNS